Humas Pemerintah Wajib Cerdas Bermedia



Rabu, 31 Oktober 2018

Humas pemerintah di era digital diwajibkan cerdas dalam menanggapi informasi yang beredar luas. Salah satu caranya adalah dengan mempublikasikan konten jurnalistik yang berkualitas, tidak hanya mempromosikan potensi daerah dan kebijakan pemerintah, tetapi juga melawan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Kebebasan tanpa batas di dunia digital dapat menghancurkan reputasi siapa pun, dan hoax, hate speech, serta fake news menjadi lahan bisnis dan senjata politik, terutama di tahun politik. Hoax bahkan telah menjadi strategi kampanye di beberapa negara, dan semakin canggih dengan munculnya video manipulasi.

Untuk melawan konten negatif di media sosial, diperlukan program literasi digital. Humas pemerintah memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi berkualitas dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya hoax dan berita palsu. Masyarakat dapat melaporkan berita yang tidak jelas kebenarannya melalui email dan website aduankonten@mail.kominfo.go.id dan http://trustpositif.kominfo.go.id. Kemenkominfo siap menindak penyebar ujaran kebencian dan hoax sesuai UU ITE.

Ancaman terbesar bagi Indonesia saat ini bukan peperangan, tetapi perang melawan hoax. Hoax dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Musuh bersama adalah proxy war dalam bentuk hoax, fake news, penyebaran paham radikal, dan ujaran kebencian. Humas pemerintah memiliki kewajiban untuk mencegahnya dengan melakukan literasi dan kurasi informasi. Pemerintah pusat, khususnya Kemenkominfo, juga berkewajiban menegakkan hukum dan menindak penyebar hoax melalui UU ITE.

Peran Humas pemerintah menjadi semakin penting dalam menghadapi era digital yang penuh dengan informasi. Kecerdasan dalam bermedia dan kemampuan dalam melawan hoax menjadi kunci untuk menjaga reputasi pemerintah, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.